PELATIHAN RISET AKSI PARTISIPATORIS (RAP) UNTUK PENANGGULANGAN *DESTRUCTIVE* DAN *ILLEGAL FISHING* DI SUNGAI SAMBAS

PARTICIPATORY ACTION RESEARCH TRAINING (PAR) FOR DESTRUCTIVE AND ILLEGAL FISHING MANAGEMENT IN SAMBAS RIVER

I Mahyudi S¹, Maryono^{1a}, D Merdekawati¹

¹ Program Studi Agribisnis Perikanan dan Kelautan, Jurusan Agribisnis, Politeknik Negeri Sambas Jl. Raya
Sejangkung Kawasan Pendidikan Tinggi Sambas – Kalimantan Barat 79400.

^aKorespondensi: Maryono ; E-mail: maryonopoltesa@gmail.com

(Diterima: 14-12-2020; Ditelaah: 15-12-2020; Disetujui: 14-04-2021)

ABSTRACT

In the Sambas watershed area, especially the upstream area, one of which is Sepantai Village, destructive fishing occurs almost every year. The wide area of the mainland public waters of Sambas Regency is one of the limitations for monitoring destructive fishing activities. Starting from the limitations of supervisory personnel, surveillance fleets and a very wide area coverage. Community participation is very much needed to jointly fight destructive fishing. Community participation can be carried out by observing or monitoring fishery activities and environmental utilization in the area. This community service activity is a series of exploration activities for fish diversity in the Sambas watershed. Agribusiness Fisheries and Marine Poltesa which is the only college in the field of fisheries in Sambas Regency collaborates with village governments along the Sambas River Basin to conduct education and training on Participatory Action Research (PAR) in the context of tackling destructive and illegal fishing on the Sambas River, West Kalimantan. This activity is intended for various levels of village society, ranging from representatives of village officials, fishing groups, pokmaswas, youth organizations, youth groups and other community groups. From this activity, it is hoped that plans will emerge for the creation of regulations on destructive fishing which can be translated into village regulations, increase the productivity of activities of the supervisory community groups and greater educational activities for the people of Sepantai Village. With the presence of conservation activist cadres, it is hoped that they will be able to transmit knowledge and enthusiasm in fighting destructive fishing and assist villages in formulating policies related to related matters. Besides, this activity will be published in scientific publications such as national seminars or journals and mass media both online and in print.

Keywords: PAR, Sepantai, destructive, illegal, fishing.

ABSTRAK

Daerah DAS Sambas, terutama daerah hulu yang salah satunya Desa Sepantai hampir setiap tahun terjadi kasus destructive fishing. Luasnya wilayah perairan umum daratan Kabupaten Sambas menjadi salah satu keterbatasan untuk mengawasi kegiatan destructive fishing. Mulai dari keterbatasan personil pengawasan, armada pengawas dan jangkauan wilayah yang sangat luas. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama memerangi destructive fishing. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan mengamati atau memantau kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan rangkaian dari kegiatan eksplorasi keanekaragaman ikan di DAS Sambas. Agribisnis Perikanan dan Kelautan Poltesa yang merupakan satu-satunya perguruan tinggi bidang perikanan di Kabupaten Sambas melakukan kerja sama dengan pemerintah desa sepanjang DAS Sambas untuk melakukan edukasi dan pelatihan Riset Aksi Partisipatoris (RAP) dalam rangka penanggulangan destructive dan

illegal fishing di Sungai Sambas, Kalimantan Barat. Kegiatan ini di peruntukan untuk berbagai lapisan masyarakat desa, mulai dari perwakilan perangkat desa, kelompok nelayan, pokmaswas, karang taruna, kelompok pemuda dan kelompok masyarakat lainnya. Dari kegiatan ini di harapkan muncul rencana pembuatan regulasi tentang destructive fishing yang bisa di terjemahkan dalam peraturan desa, peningkatan produktifitas kegiatan kelompok masyarakat pengawas dan kegiatan edukasi yang lebih besar untuk masyarakat Desa Sepantai. Dengan adanya kader-kader penggerak konservasi diharapkan mampu menularkan pengetahuan dan semangat dalam memerangi destructive fishing dan membantu desa dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan hal terkait. Selain itu, kegiatan ini akan di publikasikan pada publikasi ilmiah seperti seminar nasional atau jurnal dan media masa baik daring maupun cetak.

Kata Kunci: RAP, Sepantai, destruktif, ilegal, penangkapan

Mahyudi, I., Maryono., & Merdekawati., D. (2021). Pelatihan Riset Aksi Partisipatoris (RAP) Untuk Penanggulangan Destructive and Illegal Fishing di Sungai Sambas. *Jurnal Qardhul Hasan : Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1) 48-52.

PENDAHULUAN

Maraknya praktik penangkapan ikan secara illegal di perairan umum daratan Indonesia disinyalir terkait dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bentuk kegiatan illegal fishing ditengah lemahnya sistem pengawasan. Praktik *illegal fishing* yang marak terjadi terdiri dari 3 jenis, yakni: 1) praktik pencurian ikan di kawasan konservasi, 2) praktik penangkapan ikan yang bersifat destruktif oleh nelayan lokal, dan 3) praktik penangkapan spesies ikan yang di lindungi. Kasus illegal fishing ini merupakan kisah lama yang tidak pernah tuntas di Indonesia dan bahkan sudah menimbulkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah per tahunnya.

Di sisi lain, kegiatan penangkapan ikan yang bersifat destruktif (*destructive fishing*) seperti penggunaan bom ikan dan racun, juga marak terjadi di perairan kita. Cara-cara penangkapan ikan seperti ini secara nyata telah merusak habitat ikan, seperti kerusakan habitat terumbu karang di laut dan ekosistem perairan umum daratan yang sudah mengkhawatirkan. Menurut kajian dari Mahyudi (2017), destructive fishing seperti putas (racun), setrum dan tembak bukan hanya menyebabkan lebih tangkap (*over fishing*), tapi juga memutus daur hidup dan memicu menurunnya biodiversitas ikan.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki

wilayah yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Kabupaten ini memiliki 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total hamparan 516.200 ha yang meliputi DAS Paloh (64.375 ha), DAS Sambas (258.700 ha) dan DAS Sebangkau (193.125 ha) (Pemerintah Kabupaten Sambas, 2013). Sebagai kawasan perbatasan dan terdepan Indonesia, daerah ini memiliki kelebihan tersendiri dari sisi ekologi, diantaranya yaitu mendapat suplai distribusi biodiversitas flora dan fauna yang konektivitas antara Indonesia dan Malaysia khususnya di pulau Borneo yang saat ini belum tereksplorasi dengan baik.

Desa Sepantai merupakan salah satu desa yang berada di hulu DAS Sambas, yang masyarakatnya sebagai besar bermata pencarian sebagai nelayan. Kegiatan penangkapan baik ikan maupun udang galah di hulu DAS Sambas tergolong tinggi, karena kawasan ini dianggap menjadi spot terbaik untuk kegiatan penangkapan. Dari informasi pemerintah desa, saat ini tercatat paling tidak ada dua kelompok yang terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya perairan hulu DAS Sambas sekitar Desa Sepantai. Pertama, kelompok yang memanfaatkan sumberdaya perairan berdasarkan kelembagaan formal, yaitu kelompok mancing ikan/udang, kelompok nelayan dan kelompok masyarakat pengawas. Kelompok ini memanfaatkan sumberdaya perairan sebagai pusat mata pencarian, menyalurkan hobi, wisata, konservasi dan kegiatan sosial

lainnya. Kedua, kelompok yang memanfaatkan sumberdaya perairan berdasarkan kelembagaan informal, yaitu masyarakat umum yang terdiri dari nelayan sambilan yang tidak tergabung dalam kelompok formal baik yang di bentuk desa maupun instansi terkait. Oknum kelompok ini yang biasanya meresahkan masyarakat setempat karena dalam kegiatan penangkapan cenderung menggunakan bahan dan alat yang bersifat destructive fishing, seperti putas (racun) dan setrum secara diam-diam. Ikan yang di tangkap pun tergolong jenis dan atau ukuran yang di larang untuk di tangkap berdasarkan undang-undang No 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Di Desa Sepantai sendiri hampir setiap tahun terjadi kasus illegal fishing. Bentuk dan akhirnya pun beragam, dimulai dari kasus destruktive fishing yang tertangkap, kasus penangkapan ikan langka dalam jumlah besar dan terakhir kasus kematian ikan massal yang terjadi di akhir tahun 2019 yang hingga saat ini belum di temukan penyebab dan pelakunya (Gambar 1). Dengan luasnya wilayah perairan umum daratan Kabupaten Sambas, memang terdapat keterbatasan pemerintah untuk mengawasi kegiatan destructive fishing. Mulai dari keterbatasan personil pengawasan, armada pengawas dan jangkauan wilayah yang sangat luas. Untuk itu, peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama memerangi pelaku destructive fishing. Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan mengamati atau memantau kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya, kemudian melaporkan adanya dugaan kegiatan destructive fishing kepada Pengawas Perikanan atau aparat penegak hukum. Secara umum, problematika masyarakat hulu DAS Sambas seperti Desa Sepantai yang terjebak kegiatan illegal fishing di musim-musim tertentu adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan illegal fishing itu sendiri, baik berupa bentuk, jenis, regulasi, sanksi dan efeknya.

Selain itu, pemerintah desa sampai kelompok masyarakat pengawas yang bertugas sebagai leading sektor di bawah juga tidak terlalu paham dan menguasai materi terkait. Sehingga pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pembentukan lembaga/ kelompok pengawas saja. Secara khusus, pembinaan kapasitas kelompok masyarakat seperti POKMASWAS perairan umum daratan belum begitu intensif dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, hal ini disinyalir karena belum adanya kawasan konservasi perairan umum daratan, sehingga dukungan program dan finansial dari pemerintah daerah pun juga lemah untuk kegiatan pengawasan.

MATERI DAN METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dimulai dengan kunjungan ke Desa Sepantai, Kecamatan Sejangkung pada tanggal 12-13 September 2020 dari tim riset dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Sambas. Kegiatan pada pengabdian ini dalam bentuk pelatihan dan pendampingan calon Kader Penggerak Konservasi. Kegiatan di Desa Sepantai yang telah dilakukan termasuk kategori action research atau riset aksi.

Riset aksi melibatkan partisipasi aktif kelompok masyarakat yang terorganisir maupun unsur pemerintah yang ada di wilayah sasaran, sementara secara bersamaan proses penelitian juga dijalankan (Haynes *et al.*, 2019).

Adapun susunan acara pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

No	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
1.	10.30 – 15.00	Perjalanan menuju Kumpai menggunakan motor air dari pelabuhan wisata keraton Sambas;
2.	15.00 – 16.00	Melanjutkan perjalanan air dari Kumpai

		menuju Dusun Sepandak Desa Sepantai menggunakan dua unit <i>speed boat</i> ;
3.	16.00 – 18.00	Mulai pelatihan calon Kader Penggerak Konservasi mengenai isu dan regulasi terkait perikanan dan lingkungan perairan umum daratan, serta teknik studi kelayakan usaha perikanan;
4.	18.00 – 20.00	Istirahat, sholat dan makan malam bersama;
5.	20.00 – 23.00	Diskusi sekaligus <i>follow up</i> terkait materi yang telah di sampaikan;
6.	23.00 – 05.00	Istirahat;
7.	05.00 – 07.00	Sholat, mandi, sarapan dan persiapan diri untuk turun lapang;
8.	07.00 – 08.00	<i>Setting</i> alat dan bahan yang akan di bawa;
9.	08.00 – 12.00	Praktik teknik sampling ikan dan air di Danau Kurapan dan hulu Sungai Sambas menggunakan dua unit <i>speed boat</i> dan 4 unit perahu. Pada saat praktik,
10.	12.00 – 13.00	Istirahat, sholat dan makan siang bersama;
11.	13.00 – 17.00	Praktik pengenalan

teknik identifikasi ikan dengan metode taxonomi;
--

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan dan pendampingan riset aksi partisipatoris (RAP) telah dilaksanakan di Desa Sepantai dengan melibatkan kelompok masyarakat dan pemerintah desa. Kelompok masyarakat dan pemerintah desa sangat kooperatif dalam kegiatan ini dan bahkan diluar ekspektasi dari tim PKM dan riset Poltesa karena jumlah peserta yang hadir di mulai dari hari pertama dan hari kedua sebanyak 20 orang melebihi target sekitar 10-15 orang. Sehingga armada perahu pada saat pelatihan sampling juga bertambah dan bahkan ada beberapa nelayan yang ikut membawa perahunya sendiri untuk mengikuti kegiatan pelatihan teknik sampling ikan dan pelatihan teknik sampling kualitas air. Pelatihan teknik sampling ikan dilakukan di 2 lokasi, yakni Danau Kurapan dan hulu Sungai Sambas pada 2 titik stasiun pengamatan. Pengambilan sampel air dan pengukuran diajarkan secara teori maupun praktik kepada para calon Kader Penggerak Konservasi. Sedangkan pada kegiatan pelatihan identifikasi ikan dengan metode taksonomi (Gambar 6) diikuti oleh 3 orang calon Kader Penggerak Konservasi sekaligus memberikan buku identifikasi ikan serta mengajarkan cara penggunaannya. Pelatihan ini diharapkan mengedukasi para calon Kader Penggerak Konservasi sebagai ujung tombak pengenalan kepada masyarakat lainnya sehingga ikut serta dalam menjaga kelestarian ekosistem sungai dan danau.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelatihan dan pendampingan ini masih perlu pemantauan lanjutan dalam mengevaluasi perkembangan para calon Kader Penggerak Konservasi. Diharapkan

setelah kegiatan ini, para masyarakat termotivasi untuk bergerak bersama-sama. dalam menjaga perairan di Desa Sepantai sehingga tidak tercemar. Diperlukan sinergitas antara masyarakat dan pemerintah daerah setempat dalam mencegah terjadinya illegal fishing dan destructive fishing yang dapat mengancam kelangsungan sumberdaya ikan yang ada di sungai dan danau kedepannya.

SARAN

Diperlukan kajian lebih lanjut dalam proses perumusan draf tentang larangan illegal fishing dan destructive fishing ke dalam Perdes, sehingga kelestarian sumberdaya ikan dapat terjaga untuk pemanfaatan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Haynes, E. *et al.* 2019. Community-based participatory action research on rheumatic heart disease in an Australian Aboriginal homeland: Evaluation of the "On track watch" project', *Evaluation and Program Planning*, 74, pp. 38–53. doi: 10.1016/j.evalprogplan.2019.02.010
- Mahyudi, I.S. 2017. Kajian Biodiversitas Iktiofauna di Kawasan Penyangga Resort Suo-Suo Taman Nasional Bukit Tigapuluh [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. 2013. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kabupaten Sambas. Sambas: RZWPPK Sambas.